

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan adalah suatu organisasi dimana sumber daya (*input*) dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa (*output*) kepada pelanggan. Tujuan utama perusahaan adalah mencari laba yang semaksimal mungkin. Untuk mencapai tujuan tersebut manajemen harus dapat mengolah perusahaan secara efektif dan efisien demi kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan memiliki fungsi yang begitu besar bagi masyarakat sehingga memudahkan perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya.

Aktivitas ekonomi yang dijalankan perusahaan sebagaimana prinsip etika bisnis diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat. Penerapan etika bisnis tersebut merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial-moral suatu institusi bisnis dan para pelaku dunia usaha terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Menyadari dampak-dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasinya perusahaan hendaknya memperhatikan dampak-dampak tersebut dan turut serta menjaga dan peduli terhadap lingkungan sekitar masyarakat sebagai *stakeholders*. Salah satu yang dapat dilakukan adalah mengadakan aktivitas sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar yang disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Corporate Social Responsibility (CSR) ditunjukkan untuk menciptakan keselarasan antara kepentingan manajemen perusahaan dengan kepentingan *stakeholders* dan dimaksudkan untuk mendorong agar perusahaan lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga pada akhirnya perusahaan akan dapat memperoleh manfaat ekonomi berkelanjutan.

Dengan penerapan akuntansi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sosial atau yang disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara benar berarti juga memenuhi *responsibilitas* yang diusung *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan CSR secara konsisten merupakan bagian dari upaya memaksimalkan nilai perusahaan. CSR merupakan komitmen perusahaan berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap mengedepankan peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas.

Melihat isu CSR yang sudah mendunia, Pemerintah Indonesia memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan CSR dengan menganjurkan praktik tanggung jawab sosial (*social responsibility*) sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab IV pasal 66 ayat 2c. Pasal tersebut menjelaskan bahwa laporan tahunan perusahaan harus mencerminkan tanggung jawab sosial.

Perusahaan yang besar dan kompleks tidak hanya memiliki kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham saja (*shareholders*) tetapi juga kewajiban-kewajiban kepada pihak lain yang lebih luas lagi termasuk

masyarakat dan lingkungan dalam aktivitasnya, setiap perusahaan akan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Akibat dari adanya interaksi ini menuntut adanya timbal balik antara perusahaan dan lingkungan sosialnya yang berimplikasi pada timbulnya dampak-dampak sosial atas kegiatan operasi perusahaan pada lingkungannya. Sepanjang perusahaan menggunakan sumber daya manusia dan komunitas yang ada, maka perusahaan memiliki *profit* dan mengembalikan sebagian *profit* tersebut kepada masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu terkait tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sujono dan Winartie yang dalam penelitiannya membahas penerapan akuntansi sosial pada PT. Sriwidjaja. Dalam penelitian tersebut disebutkan **“bahwa latar belakang diterapkannya akuntansi sosial pada perusahaan tersebut adalah masih adanya sentimen negatif dari masyarakat yang disebabkan belum adanya pelaporan atas tanggung jawab sosialnya yang membuat tidak semua pihak mengetahui tanggung jawab sosial PT. Pupuk Sriwidjaja”**.¹

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Aditya Priyanto Putra yang dalam penelitiannya tersebut disebutkan **“bahwa terdapat dua bentuk program CSR yang dikelola PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yaitu program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) dan Program Kemitraan bina lingkungan, dibuat laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas program yang terpisah dengan laporan keuangan utama perusahaan”**.² Menurut hasil

¹ Jurnal.umrah.ac.id/wp-content/upload/

² Repository.unej.ac.id/bitstream/

penelitian Rosinta Purba pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Tarutung yaitu penelitian ini menemukan **“bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Tarutung dalam melaporkan kegiatan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat belum sesuai karena hanya melaporkan biaya CSR kedalam bentuk laporan biaya pegawai yang dilaporkan secara tahunan dan dalam menilai dan mengukur biaya CSR masih tidak tepat”**.³

PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk Divisi Regional I Sumatera merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang penyelenggara layanan informasi dan telekomunikasi (InfoCom) yang memiliki layanan paling lengkap dan jaringan terbesar serta terluas. CSR pada PT. Telekomunikasi Divisi Regional I Sumatera merupakan wujud dari pelaksanaan regulasi pemerintah yang bersifat mandatory, hal ini dituangkan melalui salah satu aktivitas CSR yang dikenal dengan sebutan PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan). Dalam hal ini PKBL mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan pelaporan aktivitas sosial, sehingga PKBL mempunyai kedudukan yang mandiri dan berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan secara terpisah dengan laporan keuangan perusahaan serta bertanggung jawab atas aktivitas ekonomi dan pengendalian administrasi. Mengingat bahwa perusahaan ini adalah salah satu perusahaan milik pemerintah dan mengingat pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan pelaporannya sebagai wujud dari akuntansi pertanggungjawaban sosial serta adanya regulasi yang resmi terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

³ Rosinta Purba, **Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan**, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, 2015

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik membahas dalam tulisan skripsi yang berjudul : **Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial pada PT.Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk Divisi Regional I Sumatera.**

1.2 Rumusan Masalah

Setiap Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya akan selalu menghadapi masalah yang berbeda sesuai dengan jenis kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan tersebut yang menghambat dalam pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Menurut Moh nazir :

Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu fenomena, adanya kemenduaaan arti (*ambiguity*), adanya halangan dan rintangan, adanya celah atau (*gap*), baik antara kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ataupun yang akan ada.⁴

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang dirumuskan adalah : **Bagaimana Pengukuran dan Pelaporan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial pada PT.Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk Divisi Regional I Sumatera.**

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran pembahasan serta adanya keterbatasan waktu dan pengetahuan penulis, maka penelitian ini dibatasi pada

⁴ Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Ketujuh : Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, Hal.

penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial pada PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk Divisi Regional I Sumatera area Medan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengukuran dan pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial pada PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk Divisi Regional I Sumatera telah diterapkan sebagaimana mestinya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis ini memiliki manfaat bagi banyak pihak antara lain :

- a. Bagi Penulis, untuk memperoleh perbandingan yang nyata antara teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan yang ada di lapangan sehingga berguna untuk menambah wawasan penulis mengenai pentingnya penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial.
- b. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada manajemen dalam hal penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan.
- c. Bagi Peneliti lainnya, sebagai bahan referensi dan tambahan informasi pengetahuan apabila akan mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang serupa pada masa yang akan datang.

BAB 2

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Sebelum pada uraian yang lebih luas ada baiknya dijelaskan dahulu pengertian akuntansi. Akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil keputusan oleh para pemakainya. Akuntansi tersebut dipakai baik oleh organisasi-organisasi yang bersifat untuk semata-mata mencari keuntungan maupun organisasi yang sifatnya tidak mencari keuntungan. Pemakaian ini untuk mencatat transaksi-transaksi kegiatan ekonomi yang terjadi pada organisasi tersebut kemudian hasilnya adalah untuk memberikan informasi.

Menurut Komite istilah *American Institute Of Certified Public Accounting* (AICPA) dalam buku Adanan Silaban dan Hamonangan Siallagan mendefinisikan akuntansi sebagai berikut.

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.⁵

Seorang pemimpin diharapkan mampu memantau seluruh kegiatan operasi perusahaannya secara langsung. Namun, semakin kompleksnya kegiatan suatu

⁵ Adanan Silaban dan Hamonangan Siallagan, **Toeri Akuntansi**, Edisi Kedua : Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2009, Hal.3

perusahaan menyebabkan pimpinan tak lagi mampu memantau seluruh kegiatan perusahaan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab melalui penerapan akuntansi pertanggungjawaban.

Menurut Hansen dan Mowen definisi akuntansi pertanggungjawaban adalah :

Akuntansi pertanggungjawaban adalah system yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan memengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk tujuan bersama.⁶

Sedangkan menurut Mulyadi definisi akuntansi pertanggungjawaban adalah :

Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan biaya dan pendapat dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan biaya dan atau pendapat yang dianggarkan.⁷

Sehingga dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan merupakan suatu sistem dalam akuntansi yang dihubungkan dengan pusat pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja yang dicapai dengan tujuan untuk menunjuk orang atau kelompok yang memiliki rasa tanggung jawab atas kinerja yang dihasilkan.

⁶ Hansen and Mowen, **Akuntansi Manajemen**, Jilid Dua, Erlangga, Jakarta, 2009, Hal. 229

⁷ Mulyadi, **Akuntansi Manajemen : Konsep Manfaat dan Rekayasa**, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Jakarta, 2004, Hal.422

Akhir-akhir ini tema kebijakan perusahaan yang bertanggung jawab sosial (CSR) semarak dan ramai dibicarakan sebagai suatu program yang wajib dilaksanakan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah konsep yang tengah berkembang secara global dan penerapannya telah meramba ke semua sektor, khususnya sektor industri. Perusahaan yang mengadopsi dan menjalankan konsep tanggung jawab sosial dewasa ini telah mendapatkan perhatian dari kalangan kreditor dan kalangan investor. Di lain pihak, perusahaan-perusahaan yang selama ini menjalankan pertanggungjawaban sosial relatif terganggu kegiatan operasinya.

Definisi tanggung jawab sosial perusahaan menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) yang ditulis oleh Bambang Rudito dan Melia Famiola yaitu :

Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.⁸

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *stakeholders*, terutama komunitas masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral dengan atau aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas.

⁸ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Corporate Social Responsibility*, Cetakan Pertama : Rekayasa Sains, Jakarta, 2013, Hal. 106

Sementara itu menurut Sadono Sukirno tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) adalah **“tindakan perusahaan yang bukan sepenuhnya tertumpu kepada tujuan memperoleh keuntungan tetapi juga didasarkan kepada tujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan kesejahteraan mereka”**.⁹

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab sosial (*Social Responsibility Accounting*) merupakan bagian ilmu akuntansi yang memperhitungkan pertukaran yang terjadi antara perusahaan dan lingkungan sosialnya.

Menurut Sofyan Syafri Harahap ada tiga model dan kecenderungan tentang ketertiban perusahaan kegiatan sosial, yaitu :

1. Model Klasik

Pendapat ini, yang berkembang abad ke-19, bertitik-tolak pada konsep persaingan sempurna, di mana perilaku ekonomi terpisah dan berbeda dengan bentuk dan jenis perilaku yang lain. Tujuan perusahaan hanya untuk mencari untung yang sebesar-besarnya. Kriteria keberhasilan perusahaan diukur oleh daya guna dan pertumbuhan. Menurut pendapat ini, usaha yang dilakukan perusahaan semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan pasar dan mencari untung yang akan dipersembahkan kepada pemilik modal. Jelasnya perusahaan, menurut pendapat ini, tidak perlu memikirkan efek sosial yang ditimbulkan perusahaannya dan tidak perlu memikirkan usaha untuk memperbaiki penyakit sosial.

2. Model Manajemen

Menurut pendapat ini perusahaan dianggap sebagai lembaga permanen yang hidup dan punya tujuan tersendiri. Dengan demikian, manajer sebagai tim yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan terpaksa memilih kebijakan yang harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan mengingat ketergantungannya dengan pihak lain (masyarakat) yang juga punya

⁹ Sadono Sukirno, et, al, **Pengantar Bisnis**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Hal. 326

andil dalam pencapaian tujuan perusahaan yang tidak hanya memikirkan setoran buat pemilik modal

3. Model Lingkungan Sosial

Model ini menekankan bahwa perusahaan meyakini bahwa kekuasaan ekonomi dan politik yang dimilikinya mempunyai hubungan dengan kepentingan (bersumber) dari lingkungan sosial dan bukan hanya semata dari pasar dengan teori atau model klasik.¹⁰

Hal ini berarti bahwa akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan merupakan suatu jalan keluar bagi perusahaan untuk bertanggung jawab secara umum. Sedangkan Elkington mengemukakan dalam buku yang ditulis oleh Agus dan I Cenik Ardana bahwa **“tanggung jawab sosial perusahaan mencakup tiga dimensi, yang lebih populer dengan singkatan 3P, yaitu: mencapai keuntungan (*profit*) bagi perusahaan, memberdayakan masyarakat (*people*), dan memelihara kelestarian alam/bumi (*planet*)”**.¹¹

Dari pembahasan tersebut dapat diberikan suatu kesimpulan umum yaitu bahwa akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan proses pengukuran dan pengungkapan kinerja sosial perusahaan merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh para manajer organisasi perusahaan, karena aspek ini merupakan syarat utama bagi berhasilnya perusahaan, terutama untuk jangka panjang.

2.2 Pengukuran dan Pelaporan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos atau unsur laporan keuangan. Selama periode aktual, pencatatan dilakukan terhadap sumberdaya yang digunakan, dinyatakan sebagai

¹⁰ Sofyan Syafri Harahap, **Teori Akuntansi**, Edisi Revisi, Cetakan Keduabelas, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Hal. 402-404

¹¹ Sukirno Agus dan I Cenik Ardana, **Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya**, Edisi Revisi: Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hal. 90

biaya dan pendapatan yang di peroleh. Catatan ini dilakukan sedemikian rupa setiap data, biaya dan pendapatan diklasifikasikan menurut program dan pusat pertanggungjawaban.

Pelaporan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung. Laporan pertanggungjawaban mempunyai tujuan memberikan sejumlah informasi kepada manajer dan pengawasan mengenai kinerja dan membantu para manajer untuk mengambil keputusan.

Menurut Ansry Zulfikar seperti yang dikutip oleh Sonhaji memberikan beberapa teknik pengukuran yang dapat dipakai antara lain:

1. Penilaian Pengganti

Jika nilai dari sesuatu tidak dapat langsung ditentukan, maka kita dapat mengestimasiannya dengan nilai suatu pengganti, yaitu sesuatu yang kira-kira mempunyai kegunaan yang sama dengan yang diukur.

2. Teknik Survey

Teknik ini mencakup cara-cara untuk mendapatkan informasi dari mereka yang dipengaruhi, yaitu kelompok masyarakat yang dirugikan atau yang menerima manfaat. Pengumpulan informasi yang paling mudah adalah dengan bertanya langsung kepada anggota kelompok masyarakat yang ada.

3. Biaya Perbaikan dan Pencegahan.

Untuk biaya-biaya sosial tertentu dapat dinilai dengan mengestimasi pengeluaran yang dilakukan untuk memperbaiki dan mencegah kerusakan.

4. Penilaian dari Penilai Independen.

Penilai-penilai yang independen dapat berguna untuk menilai barang-barang tertentu. Hal ini analog dengan penilaian pengganti yang dilakukan oleh ahli dari luar perusahaan.

5. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan, misalnya denda akibat dari suatu kegiatan yang sering menunjukkan nilai sosial.

Bentuk laporan tanggung jawab sosial sampai saat ini belum ada yang baku. Di Amerika, yang merupakan kiblat akuntansi di negara kita, praktek pelaporannya masih dilaksanakan dengan tidak seragam antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Ada yang hanya menyajikan informasi sosial yang bersifat kualitatif sebagai catatan kaki atau keterangan tambahan pada penjelasan laporan keuangan. Ada yang menjalankannya dengan sederhana dan ada yang menjalankannya dengan kompleks.

Menurut Estes seperti yang dikutip oleh Sonhaji menemukan adanya bermacam-macam praktek pelaporan akuntansi sosial untuk pihak luar. Tiga tingkat cara pelaporan *social responsibility accounting* lembaga masyarakat, sebagai berikut:

1. Praktek yang sederhana

Laporan ini hanya terdiri dari uraian yang tidak disertai dengan data kuantitatif, baik satuan uang maupun satuan yang lainnya.

2. Praktek yang lebih maju

Selain yang ditunjukkan dalam metode yang sederhana seperti di atas, juga menggunakan data kuantitatif untuk menunjukkan apa yang sudah dicapai perusahaan.

3. Praktek yang paling maju.

Bentuk laporan yang selain berupa uraian data kualitatif dan kuantitatif perusahaan juga menyusun laporannya dalam bentuk neraca.

2.3 Tujuan dan Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Menurut Parker dalam Sitepu, akuntansi pertanggungjawaban sosial memiliki dua karakteristik utama, yaitu:

- a. Akuntansi pertanggungjawaban sosial tidak hanya menilai dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan perusahaannya, tetapi juga mengukur efektifitas program sosial perusahaan.
- b. Akuntansi pertanggungjawaban sosial melaporkan serta menyediakan sistem informasi untuk pihak internal dan eksternal yang memungkinkan dilakukan penilaian yang komprehensif terhadap semua sumberdaya organisasi dan dampaknya baik secara ekonomi maupun secara sosial.

Adapun tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban sosial tersebut, yaitu :

- a. Mendefinisikan dan mengukur kontribusi neto periodik suatu perusahaan kepada masyarakat, yang meliputi bukan hanya manfaat dan biaya sosial yang diinternalisasikan ke perusahaan, namun juga yang timbul dari eksternal yang mempengaruhi segmen-segmen sosial yang berhubungan.
- b. Membantu menentukan apakah strategi dan praktek perusahaan yang secara langsung mempengaruhi relativitas sumberdaya dan status kekuatan individu, masyarakat, dan segmen-segmen sosial adalah konsisten dengan prioritas sosial yang diberikan secara luas pada satu pihak dan keinginan individu pada pihak lain.
- c. Memberikan dengan cara yang optimal kepada semua kelompok sosial, informasi yang relevan dengan tujuan, kebijakan, program, strategi dan kontribusi suatu perusahaan terhadap tujuan-tujuan.

Menurut Ahmad Riahi-Belkaoui, terdapat tiga asumsi tujuan dari tanggung jawab sosial yaitu:

- a. **Yang berasumsi bahwa tujuan CSR perusahaan adalah untuk meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankannya, biasanya secara implisit, asumsi biaya perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik.**
- b. **Yang berasumsi bahwa tujuan dari CSR perusahaan adalah untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial diantara organisasi dan masyarakat. Keberadaan kontrak sosial ini menuntut dibebaskanya akuntabilitas sosial.**
- c. **Yang berasumsi bahwa CSR perusahaan secara efektif adalah perpanjangan dari palaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor.¹²**

¹² Ahmad Riahi-Belkaoui, *Accounting Theory : Teori Akuntansi*, Buku Satu: Salemba Empat, Jakarta, 2006, Hal. 349-350

2.4 Regulasi Pemerintah tentang PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan)

Adapun yang regulasi pemerintah tentang PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) sebagai berikut:

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2013, yang dananya berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN;
- b. Bahwa PKBL sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan implementasi salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, sedangkan pembiayaan yang berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN merupakan salah satu pilihan sumber pembiayaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003;
- c. Bahwa pembiayaan PKBL yang dananya berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, telah menimbulkan permasalahan akuntansi di BUMN
- d. Bahwa selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdapat perkembangan regulasi di bidang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa setiap perseroan terbatas sebagai subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dianggarkan (dibiayakan) sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

- e. Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas, agar pelaksanaan PKBL oleh BUMN dapat dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi dan sekaligus menyesuaikan sumber pembiayaan dengan perkembangan regulasi, maka perlu melakukan penataan kembali terhadap pelaksanaan PKBL khususnya mengenai sumber pembiayaan, yaitu dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, huruf d, dan e tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri BUMN tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

2.5 Ruang Lingkup dan Bentuk Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Dalam buku Sofyan Syafri Harahap, Bradshaw mengemukakan ada tiga bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yaitu:

1. *Corporate Philanthropy*

Disini tanggung jawab perusahaan itu berada sebatas kedermawanan atau kerelaan belum sampai pada tanggung jawabnya. Bentuk tanggung jawab ini bisa merupakan kegiatan amal, sumbangan atau kegiatan lain yang mungkin saja tidak langsung berhubungan dengan lembaga perusahaan.

2. *Corporate Responsibility*

Disini kegiatan pertanggungjawaban itu sudah merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan bisa karena UU atau bagaiman kemauan atau kesediaan perusahaan

3. *Corporate Policy*

Disini tanggung jawab sosial perusahaan itu sudah merupakan bagian dari kebijakannya.¹³

Selain itu terdapat 5 (lima) kemungkinan ruang lingkup dimana tanggung jawab sosial berada, yaitu (1) Sumbangan terhadap laba bersih (*net profit contribution*), (2) Sumbangan terhadap sumber daya manusia (*human resources contribution*), (3) Sumbangan terhadap public (*public contribution*), (4) Sumbangan terhadap lingkungan (*environmental contribution*), (5) Sumbangan terhadap barang atau jasa (*product or service contribution*).

Meningkatnya perhatian terhadap diterimanya tujuan sosial, haruslah tidak mengurangi pentingnya tujuan memperoleh laba, dalam hal ini terjadi timbal balik yang saling menguntungkan antara laba dan lingkungan sosial. Perusahaan bertanggung jawab untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan serta aspek lingkungan produksinya

Perusahaan dalam melakukan kegiatannya harus memperhitungkan dampak dari kegiatan operasi serta usaha perusahaan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat diluar perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang memberi manfaat bagi pegawai, misalnya pensiun, dan jaminan kesehatan.

¹³ Sofyan Syafri Harahap, **Op, Cit**, Hal. 406

Pada dasarnya bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dapat beraneka ragam dari yang bersifat *charity* sampai pada kegiatan yang bersifat pengembangan masyarakat, dari yang bernuansa abstrak sampai pada bentuk yang konkrit. Akan tetapi dari keseluruhan kegiatan tersebut, pada dasarnya tidak terkait dengan produk dari yang dihasilkan perusahaan.

Menurut Bambang Rudito dan Melia Famiola dalam bukunya menyatakan kegiatan program yang dilakukan oleh perusahaan dalam konteks tanggung jawab sosialnya dapat dikategorikan dalam tiga bentuk sebagai berikut:

1. *Public relations*

Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Biasanya berbentuk kampanye yang tidak terkait sama sekali dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Bentuk ini lebih ditekankan pada penanaman persepsi tentang perusahaan dengan cara perusahaan membuat suatu kegiatan sosial tertentu dan khusus sehingga tertanam *image* komunitas bahwa perusahaan tersebut banyak melakukan kegiatan sosial sampai anggota kegiatan komunitas tidak mengetahui produk apa yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, akan tetapi terbenam di benak anggota komunitas bahwa perusahaan bersangkutan selalu menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial.

2. *Strategi defensif*

Usaha yang dilakukan oleh perusahaan guna menangkis anggapan negatif masyarakat luas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan terhadap karyawannya, dan biasanya untuk melawan serangan negatif dari anggapan komunitas atau masyarakat yang sudah terlanjur berkembang. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan sasaran yang berbeda dengan anggapan yang telah berkembang atau bertolak belakang dengan persepsi-persepsi yang ada di masyarakat pada umumnya. Prinsipnya hampir sama dengan bentuk kegiatan *public relations*, akan tetapi berbeda pada proses kejadiannya.

3. Keinginan tulus untuk melakukan kegiatan yang baik yang benar-benar berasal dari visi perusahaan tersebut

Melakukan program untuk kebutuhan komunitas atau komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda hasil dari perusahaan itu sendiri. Kegiatan perusahaan dalam konteks ini adalah sama sekali tidak mengambil suatu keuntungan secara materil tetapi berusaha untuk menanamkan kesan baik terhadap komunitas atau komunitas berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

Biasanya bentuk keinginan tulus suatu perusahaan dalam kegiatan tanggung jawab sosialnya adalah berkaitan erat dengan kebudayaan perusahaan yang berlaku (*corporate culture*). Kegiatan CSR dari perusahaan yang bersangkutan di dorong oleh kebudayaan yang berlaku di perusahaan, sehingga secara otomatis dalam lingkungan kegiatan CSR

perusahaan yang bersangkutan sudah tersirat etika dari perusahaan tersebut.

2.6 Metode Pengukuran Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

Pengukuran terhadap kesejahteraan masyarakat dianggap dapat diukur dari seberapa besar masyarakat mampu mengakses dan mendapatkan pelayanan dari fasilitas sosial yang ada disekitarnya guna menunjang kehidupannya. Indikator kesejahteraan yang didasarkan pada aspek ekonomi yang demikian tersebut disebut sebagai indikator income. Menurut Sofyan Syafri Harahap ada berbagai metode pengukuran biaya misalnya sebagai berikut.

1. Menggunakan penelitian dengan menghitung *Opportunity Cost Approach*. Misalnya dalam menghitung *social cost* dari pembangunan, maka dihitung kerugian manusia dalam hidupnya; beberapa berkurang kekayaan; beberapa kerusakan wilayah hidupnya; dan lain sebagainya akibat pemangunan limbah. Total kerugian itulah yang menjadi *social cost* perusahaan.
2. Menggunakan daftar kuesioner, survei, lelang, dimana mereka yang merasa dirugikan ditanyai berapa besar jumlah kerugian yang ditimbulkannya atau berapa biaya yang harus dibayar kepada mereka sebagai kompensasi kerugian yang dideritanya.
3. Menggunakan hubungan antara kerugian massal dengan permintaan untuk barang perorangan dalam menghitung jumlah kerugian masyarakat.
4. Menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga. Misalnya vonis hakim akibat pengaduan masyarakat akan kerusakan lingkungan dapat juga dianggap sebagai dasar perhitungan.¹⁴

Walaupun keempat metode tersebut secara mendasar sangat berbeda tetapi pada dasarnya keempat metode tersebut digunakan untuk mengetahui kerugian serta reaksi masyarakat terhadap kegiatan perusahaan yang menimbulkan dampak

¹⁴Ibid, hal.414

negatif. Belum terdapat regulasi terkait pengukuran akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Beberapa hal yang diungkapkan dalam konsep pengukuran dan penilaian sebagai berikut.

Lingkungan:

- a. Polusi
- b. Pencegahan kerusakan lingkungan, konservasi sumber-sumber alam, dan lain-lain

Energi

- a. Konservasi energi
- b. Penghematan, dan lain-lain

Praktik Usaha yang *Fair*:

- a. Merekrut pegawai dari minoritas dan peningkatan kemampuannya.
- b. Penggunaan tenaga wanita sebagai karyawan
- c. Pembukaan unit usaha di luar negeri, dan lainlain.

Sumber Tenaga Manusia:

- a. Kesehatan dan kemauan pegawai
- b. *Training*, dan lain-lain

Keterlibatan Terhadap Masyarakat:

- a. Kegiatan masyarakat sekitar
- b. Bantuan kesehatan
- c. Pendidikan
- d. Seni, dan lain-lain

Produksi:

- a. Keamanan produksi
- b. Mengurangi polusi
- c. Keracunan, dan lain-lain¹⁵

¹⁵Ibid, hal.401

2.7 Pelaporan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan dan karyawan, dan yang kedua adalah pihak eksternal seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Menurut PSAK No. 1 paragraf ke 7 (Revisi 2009), Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Menurut Jones (1995) dalam buku yang ditulis oleh Ismail Solihin pemangku kepentingan (*stakeholders*) dikategorikan menjadi dua yaitu :

1. ***Inside stakeholders***, terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada didalam organisasi perusahaan. Yang termasuk kedalam kegiatan kategori *inside stakeholders*, adalah pemegang saham (*stakeholders*), para manajer (*managers*), dan karyawan (*employees*).
2. ***Outside stakeholders***, terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak (*constituencies*) yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang termasuk ke dalam kategori *outside stakeholders* adalah pelanggan (*customers*), pemasok (*supplier*), pemerintah (*government*) masyarakat lokal (*local communities*), dan masyarakat umum (*general public*).¹⁶

Untuk melaporkan kegiatan atau aktivitas dari tanggung jawab sosial perusahaan maka diperlukan suatu pendekatan. Tujuan dari melakukan

¹⁶ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: from charity to sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, Hal.2

pendekatan adalah untuk mengungkapkan aktivitas-aktivitas dari pertanggungjawaban sosial dan juga tujuan dari aktivitas tersebut disertai hasil yang telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pendekatan dalam laporan suatu akuntansi sosial ekonomi dapat dilakukan dengan empat pendekatan yaitu :

1. *Inventory Approach*

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling dasar dan sederhana dimana dampak sosial di definisikan dan di jelaskan. Pendekatan digunakan untuk mendaftar dan menjelaskan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan perusahaan terhadap masing-masing pihak didalam lingkungan sosialnya.

2. *Outlay Cost Approach*

Pada pendekatan ini yang diperhatikan adalah biaya-biaya yang timbul dari kegiatan perusahaan yang mempunyai hubungan dampak sosialnya. Pendekatan ini pada umumnya membandingkan biaya-biaya sosial antar periode. Namun pendekatan ini tidak terlihat jelas pengeluaran yang mempunyai dampak positif dan mana yang mempunyai dampak negatif

3. *Sosial Program Management Approach*

Pada pendekatan ini perusahaan tidak hanya mengungkapkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban sosial tetapi juga tujuan dari aktivitas tersebut disertai hasil yang telah dicapai oleh perusahaan-perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. *Cost Benefit Approach*

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling direkomendasikan untuk digunakan karena pendekatan ini dapat dilihat dampak positif maupun dampak negatif yang timbul kuantifikasi nilainya.

Pelaporan kinerja sosial perusahaan, baik secara internal maupun eksternal, dapat ditempuh melalui beberapa pendekatan. Menurut Aran Ikhsan dan Muhammad Ishak ada tiga pendekatan dalam pelaporan kinerja sosial perusahaan yaitu:

1. **Audit Sosial**

Audit Sosial dilakukan dengan mengukur dan melaporkan dampak ekonomi sosial, dan lingkungan dari program-program yang berorientasi sosial dari operasi perusahaan yang reguler. Audit sosial bermanfaat bagi perusahaan dengan membuat para manajer menyadari konsekuensi sosial dari beberapa tindakan mereka.

2. **Laporan-Laporan Sosial**

Laporan eksternal terpisah yang menggambarkan hubungan perusahaan dengan komunitasnya yang telah dikeluarkan oleh banyak perusahaan, baik di Indonesia maupun negara-negara maju. David Linowes telah mengembangkan Laporan Operasi Sosio-Ekonomi untuk digunakan sebagai dasar untuk melaporkan informasi akuntansi sosial. Linowes membagi laporannya kedalam 3 kategori yaitu hubungan dengan manusia, hubungan dengan lingkungan dan hubungan dengan produk. Pada setiap kategori, ia membuat daftar mengenai kontribusi sukarela perusahaan dan kemudian mengurangkan dengan kerugian yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan itu.

3. **Pengungkapan dalam laporan tahunan**

Banyak perusahaan menerbitkan laporan tahunan kepada pemegang saham yang berisi beberapa informasi sosial. Tetapi, karena kebanyakan informasi sosial yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan bersifat sukarela dan selektif, dapat diargumentasikan bahwa informasi tersebut memiliki nilai yang dipertanyakan dan seseorang tidak dapat menilai kinerja sosial dari perusahaan tersebut berdasarkan laporan tahunannya.¹⁷

¹⁷ Arfan Ikhsan, *Akuntansi Keperilakuan*, Edisi Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2010, Hal. 476-477

Menurut Diller dalam buku yang ditulis oleh Sofyan Syafri Harahap ada tiga teknik pelaporan pertanggungjawaban sosial:

- 1. Pengungkapan dalam surat kepada pemimpin baik dalam laporan tahunan atau bentuk laporan lainnya.**
- 2. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.**
- 3. Dibuat dalam perkiraan tambahan, misalnya melalui adanya perkiraan(akun) penyisihan kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan lingkungan dan sebagainya.¹⁸**

¹⁸ Sofyan Syafri Harahap, **Op, Cit**, Hal. 415

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penulis melakukan pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk Divisi Regional I Sumatera di Jl. Prof. HM. Yamin, SH No. 2 Medan. Perusahaan ini berherak dibidang penyelenggara layanan informasi dan telekomunikasi (InfoCom) yang memiliki layanan paling lengkap serta terluas. Pembahasan difokuskan pada akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan berupa pengukuran dan pelaporan biaya sosial.

3.2 Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dan objektif untuk mengumpulkan data. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu dengan menghimpun data teoritis mengenai pembahasan masalah melalui buku-buku pelajaran, *internet*, dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi tempat penelitian secara langsung dengan melakukan wawancara.

Moh Nazir mengemukakan:

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).¹⁹

3.3 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Data merupakan faktor yang penting dalam menunjang suatu penelitian sehingga penelitian dapat memberikan hasil yang akurat dan efektif serta dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, data primer adalah **“data yang langsung diperoleh dari sumber pertama”²⁰**

Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan berasal dari opini subjek yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Data sekunder

Menurut Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, data sekunder adalah **“data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga.”²¹**

¹⁹Moh, Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Ketujuh: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, Hal.193-194

²⁰ Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua: Cetakan Kedua: Sadia, Medan, 2011, Hal. 106.

²¹**Ibid**, Hal. 107

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh yaitu struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan dan laporan kinerja sosial perusahaan.

Cara pengumpulan data yang digunakan untuk melihat pengukuran dan pelaporan biaya sosial yaitu :

1. Daftar pertanyaan (kuesioner) yaitu dengan mengajukan seperangkat pertanyaan yang disusun secara tertulis dengan jawaban yang diperoleh secara tertulis. Data yang di kumpulan adalah berupa daftar pertanyaan responden.
2. Dokumen adalah teknik pengumpulan data dari laporan-laporan yang sudah diolah sebelumnya sehingga tidak langsung diperoleh dari sumbernya. Data yang dikumpulkan dengan metode ini adalah struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan dan laporan kinerja sosial perusahaan.

3.4 Metode Analisis Data

1. Metode Deskriptif

Metode analisa yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif karena data bersifat kualitatif. Data-data dan informasi yang diperoleh akan dianalisa dengan deskriptif kualitatif dengan menggambarkan keadaan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan sehingga dihasilkan suatu gambaran

yang jelas tentang pengukuran dan pelaporan biaya sosial dalam PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk Divisi Regional I Sumatera.

2. Deduktif

Deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus (individual).

“Penalaran deduktif adalah prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui, atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.”²²

²² Trimaja.blogspot.com/2013/04/makna-contoh-dari-penalaran-deduktif.html?m=1

